



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Januari 2018

Halaman: 13

▶ FASILITAS UMUM

Trotoar Jogja Tak Ideal

JOGJA—Malafungsi trotoar masih banyak terjadi di Kota Jogja baik untuk kegiatan ekonomi seperti parkir, iklan, sampai dengan pembangunan halte *Trans Jogja*.

Ujang Hasanudin & Sekar Langit Nariswari
redaksi@harianjogja.com

Pemerintah dinilai berkontribusi dalam penyalahgunaan fasilitas publik tersebut. Hal ini disimpulkan dalam dialog bertajuk *Pemmasalahan Trotoar di Kota Jogja* yang diselenggarakan oleh Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Kota Jogja bekerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan DIY pada Selasa (23/1).

Ketua ORI DIY Budhi Masthuri mengatakan perlu dilakukan gerakan warga untuk mengidentifikasi masalah trotoar dan mendorong perubahan dan perbaikan. Budhi menjelaskan pemerintah ikut berkontribusi salah satunya dengan menjadikan trotoar sebagai tempat pot bunga, halte maupun menghilangkan areal pejalan kaki itu dengan adanya pelebaran jalan. Selain itu, ada juga pengusaha hotel yang menghilangkan trotoar dengan menjadikan areal parkir mobil. "Pemerintah sendiri tidak cukup responsif terhadap hal seperti ini," katanya.

Sejumlah titik di Kota Jogja sendiri sudah dilengkapi dengan trotoar yang cukup baik seperti di kawasan Malioboro sisi timur. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan masih kurang. Budhi menyebutkan, berdasarkan testimoni peserta, ditemukan pula sampah berupa alat kontrasepsi di areal padat wisatawan itu.

Renny Anggriana Fragesty, salah satu pengagas KP4 DIY mengatakan masih banyak trotoar yang tidak nyaman khususnya bagi lansia dan difabel. Pelanggaran ini banyak terjadi baik dilakukan maupun dilihat oleh semua kalangan. Salah satunya seperti trotoar yang dijadikan jalan pintas

Trotoar Jogja...

Umi mengatakan tahun lalu pihaknya sudah berhasil menata trotoar dengan lebar satu meter di wilayah Langensari dan Balapan, Gondokusuman. Sebelumnya, kata dia, trotoar di dua kawasan itu hanya menyisakan sekitar 40 sentimeter karena ditempati oleh pedagang. Namun dengan pendekatan yang intens, akhirnya pedagang menyadari dan mau mundur.

Tahun ini, pihaknya berencana membangun trotoar di Jalan Prawirotaman dengan luas satu meter sampai 1,5 meter. Namun trotoar di kawasan tersebut dibangun hanya dari satu sisi, yakni di sisi utara, mengingat ruas jalan tersebut sempit.

Selain di Prawirotaman, trotoar juga akan dibangun di Jalan Suroto di bagian sisi timur dan barat jalan.

Namun Umi belum bisa bicara panjang lebar, karena rencana penataan Jalan Suroto yang dibiayai danais itu masih dimatangkan. Sementara anggaran untuk penataan trotoar di lokasi lainnya, kata Umi, menjadi satu kesatuan dengan anggaran pemeliharaan jalan dengan nilai sekitar Rp20 miliar, selama setahun.

Umi juga mengimbau kepada para pemilik toko-toko di pinggir jalan tidak mengubah posisi trotoar yang sudah dibangun. Ia melihat masih ada alih fungsi trotoar menjadi jalan masuk kendaraan sehingga menyulitkan pejalan kaki, terutama untuk difabel. "Trotoar itu sudah disesuaikan dengan fungsinya, jadi jangan sampai diubah-ubah."

1.1 Umi mengimbau...

Untuk Diketahui
 Jumpa Pers

Perlu dilakukan gerakan warga untuk mengidentifikasi masalah trotoar dan mendorong perubahan dan perbaikan.

Pemerintah ikut berkontribusi salah satunya dengan menjadikan trotoar sebagai tempat pot bunga dan halte.

sepeda motor menuju garis depan saat lampu merah dan menjadi areal disipai kendaraan atau barang baru dari toko yang berlokasi di depan trotoar tersebut dengan alasan ruang toko yang terbatas. Hanya saja pengawasannya masih longgar karena seringkali masyarakat tidak tahu harus mengadu kepada siapa. "Tiang listrik, pot, halte dan warung di trotoar itu kan kaitannya masing-masing dinas berbeda," katanya.

Ia juga mempertanyakan peran pemerintah selama ini karena adanya pembiaraan. Malafungsi yang terjadi bisa saja merupakan bentuk tutup mata pemerintah atau malah memberikan izin atas tindakan tersebut.

Karena itu, diskusi ini sekaligus sebagai awalan untuk membentuk kesadaran akan pengawasan tersebut. Wanita yang juga merupakan ketua dari Perkumpulan Narasita ini menjelaskan publik berperan besar terhadap fungsi trotoar.

Mengakui

Pemerintah Kota mengakui keberadaan trotoar di Jogja belum ideal. Untuk memperlebar trotoar di Jogja cukup sulit karena kondisi lahan yang terbatas. "Kota Jogja ini berbeda dengan kota-kota lain. Jogja merupakan kota yang sudah jadi, jadi yang kami lakukan hanya bisa menata," kata Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Jogja, Umi Akhsanti.

● Lebih Lengkap Halaman 14

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005